

BAB I

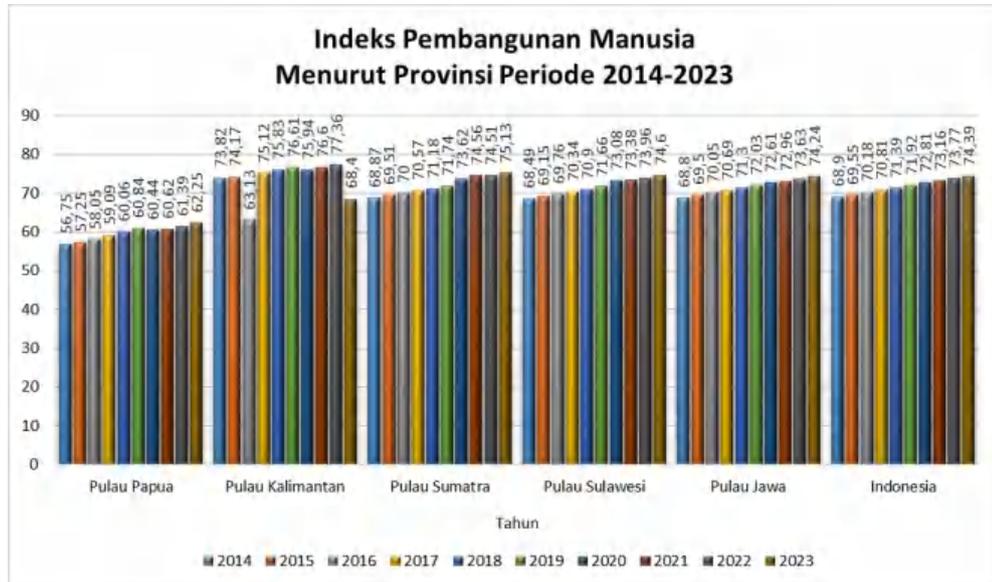
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Setiap negara atau daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya melalui pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting yang mengukur capaian pembangunan dari tiga aspek utama, yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (pertumbuhan ekonomi). Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth Theory) oleh Paul Michael Romer (1988) dan Robert Emerson Lucas Jr., (1988) menyoroti peran pengetahuan dan sumber daya manusia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Teori modal manusia oleh Theodore W. Schultz (1961) menekankan bahwa investasi dalam kesehatan dan pendidikan tidak hanya meningkatkan produktivitas individu tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan Gary S. Becker (1964) menjelaskan bahwa investasi dalam kesehatan dan pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maka perlu, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan manusia, khususnya di daerah dengan tantangan pembangunan yang kompleks seperti Provinsi Papua, sehingga menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam.





Gambar 1.1. (1) Grafik Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Periode Tahun 2014-2023. Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat (diolah sendiri).

Dari lima pulau terbesar di Indonesia, yaitu Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, dipilih lima provinsi sebagai wakil untuk setiap pulau. Perbandingan dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kelima provinsi perwakilan ini, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi kesejahteraan dan kemajuan manusia di masing-masing provinsi, termasuk faktor-faktor seperti harapan hidup yang panjang dan sehat, tingkat pendidikan, serta standar hidup yang layak. Data yang ditampilkan dalam grafik mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 2014 hingga 2023 menunjukkan tren perkembangan kualitas hidup di lima pulau terbesar di Indonesia, berdasarkan provinsi perwakilannya, yaitu Papua, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat, serta rata-rata nasional.



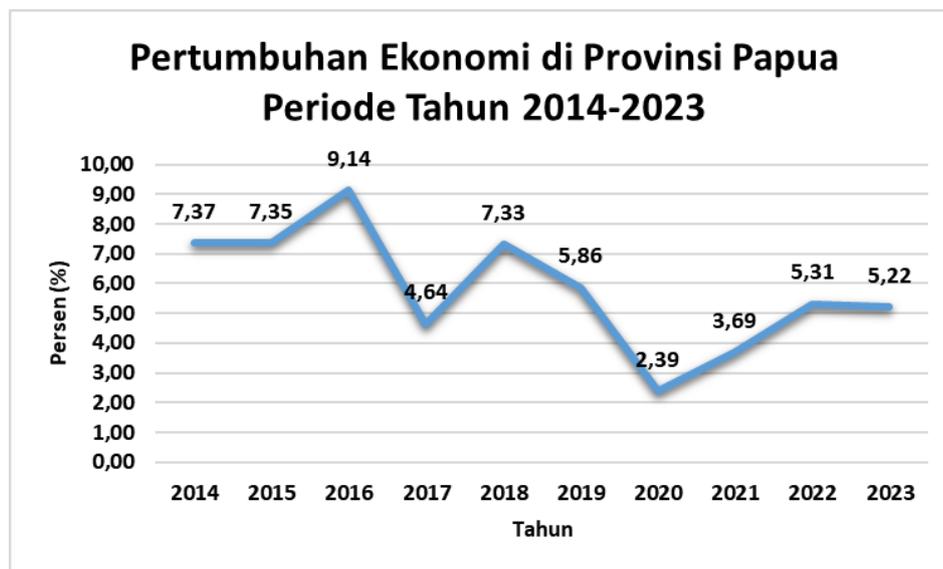
Selama periode tersebut, IPM di Provinsi Papua sebagai representasi Pulau Papua menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, meskipun tetap berada pada posisi terendah dibandingkan wilayah lain. Dari angka 56,75 pada tahun 2014, IPM Papua naik menjadi 62,25 pada tahun 2023. Ini menunjukkan terdapat perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat di wilayah ini, meskipun tantangan pembangunan di wilayah timur Indonesia masih cukup besar. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur yang mencerminkan Pulau Kalimantan sempat mengalami fluktuasi yang cukup tajam, terutama penurunan pada tahun 2016 (63,13), yang disebabkan oleh faktor ekonomi lokal seperti ketergantungan pada sektor sumber daya alam. Namun, provinsi ini mampu pulih dan mencatat angka tertinggi mencapai 77,36 pada 2022 sebelum kembali turun pada 2023 (68,4). Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat sebagai representasi Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih stabil. IPM di Sumatera Utara terus meningkat dari 68,87 pada 2014 menjadi 75,13 pada 2023, menandai kemajuan dalam pembangunan manusia. Hal serupa terlihat pada Sulawesi Selatan (68,49 menjadi 74,6) dan Jawa Barat (68,8 menjadi 74,24), yang juga mencerminkan peningkatan kualitas hidup yang konsisten, sejalan dengan pertumbuhan IPM nasional dari 68,9 pada 2014 menjadi 74,39 pada 2023.

Data tersebut menunjukkan meskipun terdapat disparitas pembangunan antar wilayah, semua provinsi mencatat peningkatan IPM dalam jangka panjang. Tren ini relevan untuk memahami dampak kebijakan pembangunan nasional yang terus mendorong pemerataan pembangunan, termasuk program-program yang ng pembangunan manusia di berbagai daerah, seperti di wilayah timur a yang tertinggal secara historis. Peningkatan IPM yang tercermin dari



data menunjukkan adanya perbaikan dalam beberapa indikator pembangunan manusia di Papua. Walau terdapat tren positif dalam IPM, beberapa fenomena menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi di Papua, peningkatan IPM tidak selalu terjadi.

Pertumbuhan ekonomi Papua menunjukkan volatilitas yang cukup besar, dengan penurunan tajam pada tahun 2020 (2,39%) yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, ekonomi Papua menunjukkan pemulihan yang kuat dengan angka pertumbuhan 3,69%, meskipun pada 2023 hanya tercatat 5,22%. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif ini perlu diimbangi dengan kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap guncangan eksternal, sambil memperkuat sektor-sektor yang lebih tahan banting.



Gambar 1.1. (2) Grafik Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Periode Tahun 2014-2023. Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua (diolah sendiri).

Meskipun Provinsi Papua mengalami perbaikan dalam beberapa indikator pembangunan manusia, namun angka IPM-nya masih jauh tertinggal dengan angka IPM nasional. Pada tahun 2023, IPM Papua tercatat sementara IPM nasional mencapai 74,39. Angka ini mencerminkan masih



adanya kesenjangan yang jelas dalam berbagai sektor pembangunan, dari segi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Dalam proses pembangunan ekonomi untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan pembentukan sumberdaya manusia yang unggul, yakni sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap mental, etos kerja, jiwa kewirausahaan, karakter yang baik, kreatif dan inovatif (Razak, 2009).

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga memberikan ilustrasi yang relevan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi dan bahkan saling bertolak belakang. Misalnya, penelitian di Provinsi Bangka Belitung menemukan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kemiskinan memberikan dampak yang cukup kuat (Havista, 2016).

Sebaliknya, penelitian Syafira et al., 2024 membahas Dana otonomi khusus tidak memberikan pengaruh yang cukup terasa ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran tidak selalu berdampak nyata pada pembangunan manusia tanpa dibarengi dengan efektivitas implementasi di lapangan. Penelitian di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak yang kuat terhadap IPM (Andri Irawan, 2022), sejalan dengan temuan di Sumatera Utara yang hanya menemukan harapan lama sekolah sebagai variabel yang benar-benar berdampak pada pembangunan manusia (Hannum, 2018) .

Ketidakkonsistenan hasil-hasil tersebut menunjukkan perlunya menguji ulang hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM, terutama di wilayah

seperti Provinsi Papua yang secara konsisten mencatatkan nilai IPM secara nasional. Papua memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi



yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, sehingga hasil-hasil studi dari wilayah lain tidak dapat secara langsung diterapkan di sana. Dengan memanfaatkan data terbaru dan rentang waktu yang panjang (2014-2023), penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai pembangunan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Papua.

Pembangunan manusia merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan, penelitian ini dapat menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih terarah. Temuan dari studi ini diharapkan mendorong perbaikan kebijakan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat Papua.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua pada periode 2014–2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk menganalisis:

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua pada periode 2014–2023.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

ngembangkan teori pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan analisis terhadap peran IPM sebagai faktor pendorong. Memperkuat literatur



tentang keterkaitan antara pembangunan manusia, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks wilayah tertinggal seperti Papua. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang mengeksplorasi hubungan antara pembangunan manusia dan ekonomi dalam berbagai kondisi regional di Indonesia atau wilayah lainnya.

Kegunaan Praktis

Pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mendorong prioritas pembangunan manusia melalui penguatan indikator IPM. Akademisi, praktisi, dan mahasiswa sebagai data empiris untuk mendukung analisis dan diskusi tentang pembangunan ekonomi di daerah dengan karakteristik khusus seperti Papua.

Kegunaan Kebijakan

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan PDRB ADHK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengambil kebijakan di tingkat regional untuk mengalokasikan anggaran secara efektif pada sektor-sektor yang mendukung pencapaian IPM tinggi, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori Pertumbuhan Endogen merupakan pengembangan dari teori pertumbuhan ekonomi yang menekankan peran faktor internal dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) sebagai kritik terhadap model Solow yang menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen. Dalam teori ini, investasi dalam sumber daya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, dianggap sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi. Lucas (1988) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, Romer (1990) menambahkan bahwa inovasi dan alih pengetahuan (knowledge spillover) juga berperan penting, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur seperti Provinsi Papua.

Kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penentu dalam teori ini. Barro (1991) menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini relevan dengan kondisi Papua, di mana pembangunan manusia masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Dengan demikian, Teori Pertumbuhan Endogen memberikan kerangka teoretis yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua.



2.1.2. Teori Modal Manusia

Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang dipopulerkan oleh Gary S. Becker (1964) menyatakan bahwa investasi dalam pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan individu merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Becker berargumen bahwa pendidikan dan pelatihan tidak hanya bermanfaat bagi individu dalam bentuk peningkatan pendapatan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan kapasitas produksi dan inovasi. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada akumulasi modal fisik, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut (Becker, 1993).

Pengembangan teori ini oleh Schultz (1961) menambahkan bahwa investasi dalam kesehatan dan nutrisi juga termasuk dalam komponen human capital, karena individu yang sehat cenderung lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Schultz memperkenalkan konsep *returns to education*, yang mengukur manfaat ekonomi dari tambahan tahun sekolah (Schultz, 1961), menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat pendidikan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan individu dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian empiris oleh Hanushek & Woessmann (2015) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan (diukur melalui hasil tes internasional) memiliki dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan sekadar kuantitas tahun sekolah.

Dalam konteks pembangunan manusia, teori human capital menjadi dasar

eks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengintegrasikan dimensi
an, kesehatan, dan pendapatan. Dengan mengadopsi prinsip yang



menekankan bahwa peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga menciptakan spillover effect bagi masyarakat, seperti penurunan angka kematian anak, peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja, dan penguatan stabilitas social (UNDP, 2020).

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan output perekonomian suatu negara atau wilayah dalam jangka panjang, yang umumnya diukur melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Menurut Adam Smith (1776) dalam *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teori-teori pertumbuhan ekonomi berkembang dari pemikiran klasik hingga modern. Teori Klasik, yang diusung oleh Smith dan David Ricardo, menekankan pentingnya pasar bebas, pembagian kerja, dan akumulasi modal sebagai penggerak pertumbuhan. Sementara itu, Teori Neoklasik Robert M. Solow (1956) menyoroti peran teknologi dan modal manusia dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Lebih lanjut, Teori Endogen Romer (1986) dan Lucas (1988) berargumen bahwa inovasi, pengetahuan, dan kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor internal yang mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan menjadi faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi investasi, konsumsi, ekspor, dan stabilitas makroekonomi, sedangkan faktor non-ekonomi p pendidikan, infrastruktur, kelembagaan, dan stabilitas politik. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi antara lain laju rhan PDB, pendapatan per kapita, dan produktivitas tenaga kerja.



Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan ekonomi dapat memperlebar ketimpangan pendapatan dan menyebabkan degradasi lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai kemajuan pembangunan suatu negara. Secara definisi, pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita dalam jangka panjang (Todaro, 2006). Berbeda dengan pembangunan ekonomi yang bersifat kualitatif dan mencakup aspek kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif dan dapat diukur melalui indikator makroekonomi seperti PDB, pendapatan per kapita, tingkat investasi, dan produktivitas tenaga kerja (World Bank & UNDP, 2023).

Terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan mekanisme pertumbuhan ekonomi. Pertama, Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan Model) menekankan peran akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai faktor pendorong pertumbuhan. Menurut Solow (1956), dalam jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui inovasi teknologi. Kedua, Teori Pertumbuhan Endogen (Romer-Lucas Model) menyatakan bahwa sumber daya manusia dan pengetahuan merupakan penggerak utama pertumbuhan. Investasi dalam pendidikan dan penelitian menciptakan

itas positif yang mempercepat pertumbuhan ekonomi (Romer, 1990).

teori Pertumbuhan Strukturalis (Lewis Model) berfokus pada transformasi



ekonomi dari sektor tradisional (pertanian) ke sektor modern (industri), di mana surplus tenaga kerja di pedesaan menjadi pendorong industrialisasi.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi sumber daya manusia, di mana pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Barro & Sala-i-Martin, 2004). Ada korelasi positif antara rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan PDB per kapita (World Bank, 2023). Selain itu, investasi fisik dalam infrastruktur dan teknologi juga berperan penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa. Sementara itu, faktor non-ekonomi seperti stabilitas politik dan kelembagaan turut menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Negara dengan tingkat korupsi rendah dan penegakan hukum yang kuat cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat (Robinson & Acemoglu, 2012). Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui beberapa mekanisme. Pertama, peningkatan pendapatan per kapita memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik (Anand & Sen, 1999). Kedua, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik (UNDP, 2020). Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan justru dapat memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan redistributif seperti pajak progresif dan program bantuan sosial diperlukan untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Piketty, 2014).



onsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

nbaga Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Development Programme* (UNDP) secara berkala merilis laporan yang

mengkaji pengembangan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ukuran kuantitatif yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Walau, IPM adalah alat ukur yang dirancang secara konsisten untuk mengevaluasi kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia, UNDP mengakui bahwa indeks ini tidak mampu mencerminkan seluruh aspek pembangunan manusia dengan sempurna karena terfokus pada indikator-indikator tertentu (UNDP), 1990).

Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi-dimensi dalam HDI mencakup tiga elemen utama yang memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi sosial dan ekonomi suatu negara:

1. *Longevity*, diukur dengan dua variabel utama, yaitu angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) yang menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat, serta angka kematian bayi per seribu penduduk (*infant mortality rate*) yang menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan dasar yang diterima masyarakat.
2. *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yaitu tingkat melek huruf penduduk yang berusia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) yang mencerminkan kemampuan dasar masyarakat dalam membaca dan menulis, serta rata-rata lama bersekolah (*mean years of schooling*) bagi penduduk berusia 25 tahun keatas, yang merefleksikan tingkat pencapaian pendidikan formal dalam masyarakat.
3. *Access to resource*, dapat diukur secara makro dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita yang dihitung dengan *Purchasing Power Parity* (PPP) dalam dolar US, yang mencerminkan daya masyarakat terhadap barang dan jasa, serta dapat dilengkapi dengan



tingkat partisipasi angkatan kerja yang menggambarkan keberagaman dan inklusivitas dalam ekonomi (World Bank & UNDP, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, komponen-komponen yang mempengaruhi HDI dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesehatan dan Umur Panjang, diwakili oleh indikator angka harapan hidup (*life expectancy rate*), yang menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat serta harapan hidup yang lebih panjang bagi penduduk.
2. Pendidikan dinilai berdasarkan tingkat literasi dan rata-rata tahun sekolah, menunjukkan upaya pengembangan sumber daya manusia dalam aspek pengetahuan, kemampuan, kreativitas, serta pemahaman nilai-nilai spiritual dan moral.
3. Pendapatan yang dinilai melalui indikator kemampuan beli masyarakat (*purchasing power parity*), yang mencerminkan kapasitas ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, HDI menjadi alat penting untuk menilai sejauh mana kemajuan suatu negara dalam pembangunan manusia. Meskipun demikian, tetap ada keterbatasan dalam indeks ini dalam menggambarkan semua aspek yang lebih kompleks dari pembangunan manusia secara menyeluruh (Sen, 1990) pembangunan manusia terdiri dari tiga komponen dasar yang bersifat universal dan menjadi tujuan utama, yaitu:

1. Kecukupan, yang merujuk pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam aspek fisik. Kebutuhan dasar ini meliputi hal-hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup individu, yang jika tidak dipenuhi, akan mengancam keberlanjutan hidup seseorang. Kebutuhan ini mencakup



pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Kegagalan dalam memenuhi salah satu dari kebutuhan ini dapat menyebabkan kemiskinan yang ekstrim dan ketertinggalan sosial. Sebagai contoh, pangan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan malnutrisi, sementara ketidakmampuan dalam akses kesehatan dapat menurunkan kualitas hidup (Sen, 1999).

2. Jati Diri, yang berhubungan dengan dorongan internal untuk tumbuh dan berkembang. Komponen ini mencakup rasa penghargaan terhadap diri sendiri, keinginan untuk maju, serta keyakinan bahwa setiap individu berhak mengejar tujuannya dan merasa layak untuk meraihnya. Semua ini tercakup dalam konsep self-esteem (harga diri), yang memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan diri dan kesadaran individu terhadap kapasitas yang dimilikinya. Tingkat self-esteem yang tinggi memungkinkan individu untuk menghadapi tantangan dengan lebih positif dan percaya diri.
3. Kemerdekaan dari Mentalitas Hamba, yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai universal dalam pembangunan manusia, khususnya kebebasan. Dalam konteks ini, kebebasan diartikan sebagai kemampuan untuk mandiri, tidak terbelenggu oleh tekanan material atau pengaruh luar dalam kehidupan. Dalam konteks ini, kebebasan berarti kemampuan untuk memilih dan menentukan arah hidup sendiri, tanpa terjebak dalam pengejaran materialistik yang seringkali mempengaruhi kehidupan manusia. Kemerdekaan dalam hal ini juga berhubungan dengan hak individu untuk menentukan pilihan tanpa dipaksa oleh keadaan atau sistem yang ada (Nussbaum, 2000).



2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan dua indikator penting dalam mengukur kemajuan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi, yang biasanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, mencerminkan peningkatan output ekonomi suatu negara, sementara IPM mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup layak (pendapatan per kapita). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM telah menjadi topik penelitian yang banyak dikaji dalam literatur ekonomi pembangunan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan IPM. Menurut studi yang dilakukan oleh Ranis dan Stewart, pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung diikuti oleh perbaikan dalam bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga mendorong peningkatan IPM (Ranis & Stewart, 1990). Hal ini terjadi karena pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya bagi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Temuan serupa juga, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, sehingga berdampak pada perbaikan IPM (Anand & Sen,



10001
n, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak selalu linier.
a penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis

meningkatkan IPM jika tidak disertai dengan kebijakan distributif yang adil. Pertumbuhan ekonomi memang memiliki hubungan yang dengan IPM, tetapi dampaknya tergantung pada bagaimana hasil pertumbuhan tersebut didistribusikan dan dikelola. Kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan pengurangan ketimpangan diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.3. Tinjauan Empirik

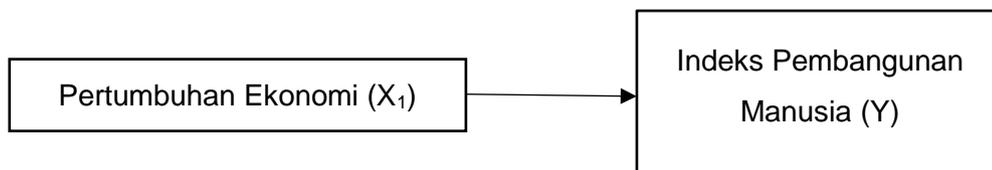
Tinjauan empirik menyajikan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berbagai studi dari berbagai negara memberikan bukti empiris yang mendukung hubungan-hubungan teoritis yang telah dibahas sebelumnya.

Studi longitudinal oleh Pelinescu (2013) yang menganalisis data dari 50 negara selama periode 1990-2010 menemukan bahwa setiap peningkatan 1% PDB per kapita berkontribusi terhadap kenaikan IPM sebesar 0,18 poin. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap IPM menjadi lebih meningkat ketika diikuti oleh peningkatan belanja publik di sektor kesehatan dan pendidikan minimal 5% dari PDB. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (World Bank, 2023) di Asia Tenggara yang menunjukkan bahwa negara-negara seperti Thailand dan Malaysia yang konsisten mengalokasikan lebih dari 20% anggaran nasional untuk pendidikan dan kesehatan mampu transformasikan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan IPM yang lebih andingkan negara dengan alokasi anggaran yang lebih rendah.



Studi komparatif oleh Altinok et al., (2018) yang menganalisis data dari 150 negara menemukan bahwa kualitas pendidikan (diukur melalui hasil tes PISA) memiliki dampak yang lebih besar terhadap IPM dibandingkan kuantitas tahun sekolah. Namun, penelitian BPS (2023) di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah tetap memberikan kontribusi, dimana setiap tambahan 1 tahun sekolah berkorelasi dengan peningkatan 0,7 poin IPM di tingkat provinsi. Temuan unik dari studi The SMERU Research Institute (2021) mengungkapkan bahwa dampak pendidikan terhadap IPM di Indonesia bersifat non-linear dampaknya lebih besar pada kelompok provinsi dengan IPM menengah ke bawah dibandingkan provinsi dengan IPM tinggi. Beberapa penelitian terbaru juga mengkaji interaksi antar variabel dalam mempengaruhi IPM.

2.4. Kerangka Konseptual/Pemikiran



Gambar 2.4. (1) Kerangka Berpikir Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun untuk menjelaskan hubungan sistematis antara pertumbuhan ekonomi (X_1) terhadap indeks pembangunan manusia (Y) sebagai variabel dependen. Berdasarkan tinjauan



an empiris sebelumnya, ketiga variabel independen tersebut tidak hanya akan secara individual tetapi juga saling berinteraksi dalam memengaruhi angka konseptual dalam penelitian ini dirancang untuk menganalisis

hubungan dinamis antara pertumbuhan ekonomi (X_1) sebagai variabel independen terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y) sebagai variabel dependen. Berdasarkan teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP (2020), IPM tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek kesehatan dan pendidikan sebagai pilar utama kesejahteraan manusia. Dalam kerangka ini, variabel independen diasumsikan tidak hanya memberikan pengaruh langsung terhadap IPM, tetapi juga saling berinteraksi secara sinergis, menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang memperkuat dampaknya secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi (X_1) berperan sebagai fondasi material yang memungkinkan peningkatan alokasi sumber daya untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Studi oleh Robinson & Acemoglu (2012) dalam *Why Nations Fail* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif menciptakan lingkaran virtuos (virtuous cycle), di mana pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan investasi lebih besar dalam infrastruktur kesehatan dan fasilitas pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Mekanisme ini hanya bekerja efektif jika pertumbuhan ekonomi disertai dengan kebijakan redistributif yang memadai, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Ravallion (2014) yang menemukan bahwa elastisitas IPM terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan ketika dibarengi dengan perluasan program perlindungan sosial.



2.5. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua.

H_{a1} : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua.

